

PROFESIONALISME GURU PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI HONG KONG

**R. Samidi¹, Verbena Ayuningsih Purbasari², Wahyu Jati Kusuma³,
M. Arif Budiman Sucipto⁴, Fitriyanto⁵**

^{1,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pancasakti Tegal

² Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Ponorogo

⁴ Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Pancasakti Tegal

Email: Rsamidi90@gmail.com

Abstrak

Tujuan tulisan ini ialah mendeskripsikan profesionalisme guru di Hong Kong pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tulisan ini mengeksplorasi kualifikasi guru, tugas dan fungsi guru dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan, serta strategi guru dalam proses pembelajaran. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari hasil pengkajian dari buku primer dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil kajian dari beberapa literatur menunjukkan bahwa Substansi profesionalisme guru di Hong Kong jika dilihat dari standar kualifikasi dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain sehingga tidak ada kualifikasi khusus yang menjadi prasyarat dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan. Konteks Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong dalam proses pembelajarannya berorientasi pada guru dikarenakan masih kuatnya hegemoni guru di dalam kelas dimana peran guru sangat kuat sekali sehingga menciptakan keterbatasan siswa dalam mengkreasikan pemikiran mereka dalam proses pembelajaran.

Keywords: Profesionalisme, Guru, Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong

Abstract

The purpose of this paper is to describe the professionalism of teachers in Hong Kong in the subject of Citizenship Education. This paper explores teacher qualifications, duties and functions of teachers in developing Citizenship Education, as well as teacher strategies in the learning process. This type of research uses a literature study method by collecting data from the results of studies from primary books and scientific journals. The results of a study of several literatures show that the substance of teacher professionalism in Hong Kong when viewed from the qualification standards in teaching Citizenship Education is integrated with other subjects so that there are no special qualifications that are prerequisites in teaching Citizenship Education. Context of Citizenship Education in Hong Kong in the learning process is teacher-oriented because the teacher's hegemony is still strong in the classroom where the teacher's role is very strong so that it creates limitations for students in creating their thoughts in the learning process.

Keywords: Professionalism, Teacher, Citizenship Education in Hong Kong

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam sebuah pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Tugas dan fungsi guru tidak hanya sekedar mengajar di dalam kelas, tetapi lebih kepada mendidik, membimbing serta membentuk kepribadian peserta didik dalam rangka mempersiapkan generasi sebagai sumber daya manusia yang mempunyai. Guru juga memiliki peran dalam melihat perkembangan setiap siswa dalam mewujudkan kehidupan yang optimal di kemudian hari.

Dalam hal jabatan guru, terdapat beberapa kriteria yang dijadikan rujukan sebagai prasyarat sebagaimana tertera dalam *National Education Association* (NEA), diantaranya: a)

membutuhkan profesionalisme yang cukup mumpuni, b) menggeluti cabang keilmuan sesuai yang diajarkan, c) melibatkan kegiatan intelektual yang tinggi, d) memerlukan pelatihan secara khusus dalam jabatan yang berkesinambungan, e) menjanjikan karir hidup yang permanen, f) adanya layanan hidup keanggotaan yang permanen, serta mempunyai organisasi profesional yang sudah terakui (Sanusi, 2015: 44). Lebih lanjut Sanusi menyatakan bahwa dalam kegiatan mengajar, setidaknya guru profesional harus menguasai dua karakteristik yang diperlukan, yaitu bahan ajar dan peserta didik. Dua kategori ini sangat dibutuhkan untuk menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam mengajar (2015: 46). Jika melihat kriteria guru profesional di atas, maka setidaknya guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki profesionalisme yang tinggi di mana guru tidak hanya terpaku pada kemahiran dan keahlian, tetapi lebih kepada sebuah panggilan jiwa serta memiliki perilaku dan moralitas yang wajib dipenuhi oleh seorang guru PKn.

Tulisan lebih berfokus pada mengurai profesionalisme guru dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong dengan mengkaji kualifikasi guru, tugas dan fungsi guru dalam mengembangkan PKn, serta strategi guru dalam proses pembelajaran. Karena posisi PKn di Hong Kong terintegrasi dengan mata pelajaran lain, maka menarik untuk dikaji posisi guru dari dua negara yang berbeda dalam mengajarkan PKn.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini yakni dengan metode studi kepustakaan (Nazir, 2003). Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang berasal dari buku primer dan jurnal-jurnal ilmiah terkait profesionalisme guru pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara induktif sesuai kajian tentang terkait profesionalisme guru pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hong Kong

1. Profil Singkat Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong

Semenjak diterbitkannya Pedoman *Civic Education* di 1985, terdapat beberapa peristiwa politik yang terjadi secara masif yang memiliki dampaknya yang sangat luar biasa dalam mengembangkan *Civic Education* di Hong Kong. Salah satu contoh yang terkenal adalah tindakan kekerasan di Cina pada tanggal 4 Juni 1989 pemrotes *Tianmen*

Square dan demonstrasi yang berujung pada penentangan lebih dari satu juta warga Hong Kong menentang tindakan dalam peristiwa tersebut sehingga dengan kejadian ini terjadi reformasi kurikulum dengan diterbitkannya pedoman Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1996 dengan substansi kajiannya diperluas termasuk memahami politik dan pemerintahan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Yan Wing & Hoi Yu, 2014: 3). Lebih lanjut Yan Wing dan Hoi Yu menjelaskan bahwa sejak sistem ekonomi kapitalis yang sangat kontras di Hong Kong dengan sistem sosialis di Cina Daratan, maka Hong Kong dijadikan sebagai Wilayah Khusus Administratif (HKSAR) yang berada dibawah “satu negara dua sistem pemerintahan”

Selama ini, sekolah-sekolah di Hong Kong, dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan lebih berorientasi dalam hal menumbuhkan nilai-nilai moral dan kewarganegaraan siswa. Sejak tahun 2002, sekolah-sekolah telah didorong untuk memupuk siswa-siswa mereka lima nilai dan sikap prioritas, yaitu ketekunan, menghormati orang lain, tanggung jawab, identitas dan komitmen nasional, dan menetapkan nilai-nilai dan sikap prioritas ini sebagai tujuan utama dalam mempromosikan Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan. Status Pendidikan Moral mulai masuk kurikulum di sekolah sekitar tahun 1981 ditandai dengan diterbitkannya Panduan tentang Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah (Secondary Educational Curriculum Guide, 2017: 3)

Sejak kembalinya kedaulatan dari pemerintahan Inggris, pengembangan kurikulum terutama di sekolah lebih menekankan pada pembentukan identitas nasional dan berkontribusi terhadap bangsa dan masyarakat sebagai salah satu dari tujuh tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan. Bahkan setelah tahun 2007, presiden Cina Hu Jintao mendesak Hong Kong untuk meningkatkan pendidikan nasional untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme anak-anak muda (Fair Brother & Kennedy, 2011: 426).

2. Iklim sosial kultural dan pendidikan di Hong Kong

Melihat dari kaca mata sejarah, Hong Kong dahulu merupakan bagian wilayah jajahan Negara Inggris dan pada tanggal 1 Juli 1997 pemerintah Inggris menyerahkan kedaulatannya kepada negara Cina Daratan (Republik Rakyat Cina). Sehingga sampai saat ini prinsip dan sistem pemerintahan Hong Kong menggunakan sistem demokrasi liberal, disebabkan karena dilihat dari konteks politik Hong Kong lebih dekat dengan pemerintahan Inggris. Latar belakang sosial kultural di Hong Kong dan kebijakan

pendidikannya menegaskan bahwa lebih kepada melestarikan kelangsungan budaya Cina dengan dikombinasikan dengan pelaksanaan pendidikan ala Barat. Karena secara historis Hongkong merupakan bagian dari Cina daratan (RRC), dengan secara otomatis nilai kultur dan sosial ditanamkan nilai-nilai Kumfusianisme.

Dalam konteks pendidikan, Pendidikan di Hong Kong disisipi nilai-nilai tradisional Cina yang menghormati otoritas yang lebih tinggi dimana siswa diharapkan untuk tunduk kepada guru mereka (Yee Wong, 2015: 17). Karena budaya dan nilai-nilai Tionghoa tradisional dalam pendidikan berpusat pada ujian sistem yang telah dibentuk dengan status guru lebih tinggi. Yee Wong menambahkan bahwa baru-baru ini inisiatif pelaksanaan pendidikan di Hong Kong memulai secara bertahap menggunakan konsep pembelajaran ala barat dengan mengaitkan peran guru dan siswa lebih banyak berpusat pada siswa (*student center learning*).

3. Kesenjangan antara peran guru dan siswa di kelas

Dalam konteks pembelajaran di kelas, guru dan siswa memiliki peran yang saling bertentangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Waller bahwa hubungan guru dan siswa terdapat sebuah dominasi dan subordinasi disebabkan guru dan siswa menempati dua posisi yang berbeda secara struktural dengan berbagai kepentingan dan tujuan dalam meningkatkan kekuatan dalam hal interaksi mereka di dalam kelas (Yee Wong, 2015: 6). Terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi antara peran guru dan siswa sebagaimana yang diungkapkan oleh Yee Wong (2015: 6-7) diantaranya: (1) Guru hanya fokus dalam mengimplementasikan kurikulum kepada siswa, sementara kebanyakan siswa di Hong Kong lebih tertarik kepada minat mereka masing-masing, (2) tidak sejalannya implementasi kurikulum oleh guru di kelas yang disebabkan karena terjadi dikotomi kekuatan di dalam kelas antara guru dan siswa untuk mencapai keinginan dasar mereka sendiri, semakin banyak keinginan guru untuk mempengaruhi siswanya maka semakin seakin mudah untuk untuk mencapai keinginan mereka sendiri, dan begitu juga sebaliknya sehingga dapat mengganggu transmisi pengetahuan dan dapat mempengaruhi pola frekuensi interaksi ruang kelas dan pembelajaran siswa, (3) dominasi kuat yang dimiliki oleh guru sehingga siswa dituntut tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam hubungan hirarkis antara guru dan siswa, guru merupakan atasan dan harus diberikan sebuah kehormatan dan status yang tinggi, sedangkan siswa diharapkan rendah hati dan patuh tanpa mendebat apa yang diperintahkan oleh guru.

Dominasi antara siswa dan guru yang terbentuk dalam sistem pendidikan di Hong Kong merupakan buah dari doktrinasi budaya Tionghoa dengan dengan menisipi kata-kata China tradisional yaitu *Zunshi Zhongdao*. Menurut Yee Wong (2015: 18), kata *Zunshi Zhondao* berasal dari kata *Zunshi* yang mengacu kepada siswa harus memperlakukan guru dengan hormat, dan *Zhandao* mengacu kepada menghargai baik pengetahuan maupun moralitas para guru. Sehingga dapat dikatan bahwa yang dimaksud dengan *Zunshi Zhondao* adalah sebuah keyakinan yang ditanamkan kepada siswa yang mengakar kuat dengan mengarahkan sikap dan tindakan siswa terhadap guru. Jadi eksistensi dari seorang guru di Hong Kong dijadikan sebagai sebuah pondasi yang kuat meraka adalah sumber utama dari pengetahuan dan pembelajaran siswa.

4. Strategi guru dan peran siswa dalam proses Pembelajaran di kelas

Dalam konteks proses belajar mengajar sekolah di Hong Kong, strategi guru di dalam kelas lebih kepada mereka mengambil inisiatif dalam mengelola kelas dalam proses pembelajaran siswa dengan memainkan peran aktif mendominasi secara radikal di dalam kelas (Yee Wong, 2015: 54). Lebih lanjut Yee Wong menyatakan bahwa kebanyakan guru di Hong Kong lebih kepada memilih untuk mempromosikan pembelajaran dengan mengelola semua kelas seperti dalam hal kedisiplinan, pemilihan startegi mengajar, teknik dan metode apa yang diterapkan di dalam kelas. Dengan demikian guru di Hong Kong memainkan peran dalam penegakan aturan dalam pengelolaan kelas, dan buku teks yang digunakan saat mengajar.

Secara umum terdapat beberapa strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, yaitu: (a) disiplin kelas dengan menerapkan aturan yang ditentukan oleh guru yang berorientasi pada ketaatan, (b) otoritas yang kuat dalam hal pengontrolan jadwal mengajar dan memimpin siswa untuk tujuan pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang dirancang oleh guru, (c) mengembangkan kurikulum dan menerbitkan buku teks, (d) menggunakan teknik manajemen kelas yang kasar seperti adanya perintah dan hukuman (Yee Wong, 2015: 54-55). Dari strategi mengajar diatas, dapat dianalisis bahwa peran guru di dalam kelas sangat kuat sekali sehingga ruang gerak siswa dalam berkreaitifitas sangat sedikit dan tugas mereka hanya mendengarkan dan mengikuti intruksi dari guru, kemudian strategi pembelajaran yang memberikan ruang yang sempit kepada siswa untuk berkontribusi pada pembangunan

pembelajaran mereka, dan bahan ajar yang digunakan dalam menopang proses pembelajaran hanya berkuat pada buku.

Sementara peran siswa dalam proses pembelajaran hanya bertindak sebagai pengikut aturan dan pengikut pembelajaran di kelas dengan mematuhi peraturan sekolah, sebagai pengikut pembelajaran, mengikuti aliran isi pengajaran yang disampaikan oleh guru, dan bekerjasama dengan guru dalam hal mempertahankan ketertiban kelas dan disiplin yang baik dan patuh menerima apa yang diajarkan (Yee Wong, 2015: 55). Dengan demikian siswa lebih sedikit diberikan kesempatan untuk membentuk dan membuat keputusan, mengelola pembelajaran untuk bebas mengekspresikan pandangan masing-masing. Dalam hal ini siswa dalam jangka panjang mereka disosialisasikan menjadi pelajar yang patuh tetapi pasif dalam arti mereka tidak diizinkan untuk berfikir kritis untuk mengemukakan pandangan mereka.

Sehingga sejak diterbitkannya kurikulum studi umum (*The Curriculum Development Council*) di tahun 2002, aturan terkait dengan proses bukan lagi bersifat *teacher center learning* tetapi lebih kepada memulai pembaruan dengan melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran dalam membentuk warga negara yang terampil yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan untuk dipersiapkan menjadi agen perubahan sosial (Joe Tin, 2010: 146).

5. Tugas dan Fungsi Guru dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar (dari kelas 1-6)

Sebelum berbicara mengenai tugas dan fungsi guru pada mata pelajaran Pendidikan Moral, setidaknya terlebih dahulu nomenklatur dari setiap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong mengalami perubahan. Pendidikan Kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan dalam dunia formal sejak tahun 1950 dan di tahun 1952 Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong dikenal dengan nama *Social Studies*. Tetapi seiring dengan dengan perkembangan zaman pada tahun 2011, di bawah tekanan dan mengikuti permintaan dari pemerintah Cina untuk memperkuat identitas nasional warga Hong Kong dan mengumumkan bahwa nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan diganti dengan *Moral and National Education* (Moral dan Pendidikan Nasional) (Leung & Yung, 2014: 5).

Dalam kurikulum pendidikan di Hong Kong untuk Sekolah Dasar, Dewan Pendidikan mengusulkan tujuh tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Moral dan Nasional (*Moral and National Education*) untuk Sekolah Dasar, diantaranya

adalah (1) siswa harus mengenal dan memahami peran mereka dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa, (2) memahami identitas nasional mereka dan berkomitmen untuk berkontribusi untuk bangsa dan masyarakat (MNE Curriculum Guide, 2016: 6)

a. Tugas guru dalam mengajarkan Pendidikan Moral di Hongkong

Guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas yang sangat strategis dalam mengajarkan Pendidikan Moral kepada siswa di Hong Kong untuk Sekolah Dasar kelas 1-6 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh dewan perkembangan kurikulum Hong Kong, di antaranya:

1) Sebagai penyedia pengetahuan

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang penguasaan siswa dalam topic tertentu, guru menyediakan perencanaan pengetahuan terkait untuk memfasilitasi diskusi dan mendorong siswa untuk melakukan analisis dan membuat obyektif penilaian rasional.

2) Moral enlightener

Dalam hal ini guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan membagikan pengalaman secara aktif sehingga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep moral dan nilai-nilai dan sikap positif dari berbagai perspektif dan sikap nilai.

3) Fasilitator pembelajaran

Guru bertindak sebagai fasilitator, guru memiliki peran menstimulasi pemikiran siswa dan memastikan diskusi yang tidak memihak dan ekspresi pendapat yang berbeda lebih belajar efektif

4) Model Peran

Para guru menunjukkan nilai-nilai dan sikap mereka terhadap kehidupan manajemen kelas, interaksi sehari-hari dengan siswa, dll. Semua ini memiliki dampak signifikan pada pengembangan nilai dan sikap siswa. (MNE Curriculum Guide, 2012: 88).

b. Fungsi Guru pada Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Hong Kong

Adapun fungsi guru pada mata pelajaran Pendidikan Moral untuk sekolah dasar kelas 1-6 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh dewan kurikulum Pendidikan Moral dan Nasional diantaranya:

- 1) Untuk bertindak sebagai teladan bagi siswa dengan menyelaraskan kata dengan tindakan.
- 2) Memanfaatkan peluang dalam hal pembelajaran seperti kunjungan ke lembaga-lembaga atau komunitas tertentu
- 3) Untuk memenuhi tujuan dan strategi dalam implementasi Pendidikan Moral, dan itu menjadi tanggung jawab semua guru (MNE Curriculum Guide, 2012: 81)

6. Tugas Guru dalam Mengajarkan Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah di Hong Kong.

Tujuan pendidikan Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah menengah di Hong Kong sebagaimana yang telah tercantum di dalam petunjuk penggunaan kurikulum pada mata pelajaran Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu diharapkan siswa mampu menerapkan pendidikan nilai (termasuk Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan serta Hukum Dasar Pendidikan) dengan melalui penyediaan kurikulum dengan menumbuhkan tujuh nilai prioritas dan sikap, diantaranya:

a. Ketekunan

Ketekunan memungkinkan siswa untuk bisa mengatasi tantangan dan kegagalan dari setiap kesulitan dengan tujuan untuk mencapai masa depan

b. Menghormati Orang Lain

Kondisi masyarakat yang beragam di Hong Kong dengan tingkat latar belakang yang berbeda baik itu ras, agama, kepercayaan, dan gaya hidup untuk dimungkinkan siswa bisa bergaul dan saing menghormati satu sama lain dengan membangun hubungan yang damai dan ramah dalam menciptakan keharmonisan antar sesama.

c. Tanggung Jawab

Dengan tujuan pembelajaran Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan siswa mengembangkan kepedulian dan sikap membantu orang lain serta mengambil tindakan yang tepat untuk saling mengayomi dengan tujuan membentuk generasi bangsa yang bertanggung jawab di berbagai domain.

d. Identitas Nasional

Hong Kong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cina Daratan, untuk itu siswa diharapkan memiliki rasa identitas nasional mulai dari Pendidikan

Dasar dan salah satunya pembelajaran pendidikan menengah. Siswa yang tidak bisa berbahasa Cina dituntut untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Cina dengan menumbuhkan rasa saling menghormati dan membangun komunitas yang harmonis.

e. **Komitmen**

Berkomitmen untuk tidak hanya menyelesaikan tugas sendiri, tetapi lebih kepada proaktif dalam menyelesaikan tugas dengan lebih serius dan kontinyu.

f. **Integritas**

Siswa diharapkan memiliki integritas yang tinggi sebagai individu dengan menepati janji dengan dibarengi oleh perbuatan yang sesuai.

g. **Peduli terhadap Orang Lain**

Siswa diharapkan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain dengan menunjukkan kepedulian dalam bentuk simpati dan empati.

(Secondary Educational Curriculum Guide, 2017: 5-7)

Adapun tugas guru pada mata pelajaran Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat sekolah menengah, diantara:

- a. Memahami tujuan dan strategi untuk implementasi pendidikan nilai; untuk mengakui bahwa itu adalah misi dan tanggung jawab bersama dari semua guru sekolah untuk mengembangkan nilai dan sikap positif siswa.
- b. Untuk bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran siswa, untuk menciptakan suasana terbuka untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar, dan mendorong kemudian untuk berbagi pandangan mereka dengan jujur dan menunjukkan rasa hormat terhadap pandangan yang berbeda.
- c. Lebih menekankan pada bagaimana memperkuat nilai-nilai positif dan sikap dan kemampuan siswa untuk berpikir dari berbagai perspektif ketika mendesain aktifitas pembelajaran di ruang kelas setiap hari.
- d. Untuk mengimplementasi visi sekolah dengan memahami karakter siswa, dan kebutuhan perkembangan menjadi pertimbangan, serta menciptakan kesempatan belajar bagi siswa untuk menunjukkan nilai-nilai dan sikap positif, dan
- e. Untuk mendorong siswa dalam hal ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan nilai yang diselenggarakan oleh sekolah atau organisasi lain, dan untuk memperkuat efektivitas pembelajaran melalui diskusi dan berbagai kegiatan lainnya. (Secondary Curriculum Educational Guide, 2017: 18)

7. Kualifikasi Guru

a. Pendidikan Guru secara Umum

Pendidikan guru di Hong Kong menyediakan empat institusi pendidikan guru yaitu, *Hong Kong Institute of Education*, *The Hong Kong Baptist University*, *Cina Hong Kong University*, dan *Hong Kong University (ICCS*, 2013: 191). Lebih lanjut ICCS (2013: 191) menjabarkan jenjang pendidikan di Hong Kong sebagai sebuah persyaratan untuk menjadi seorang guru, diantaranya:

- 1) Lulusan dengan memegang kualifikasi B.Ed (*Program Bachelor of Education*) atau lulusan dengan gelar sarjana di tambah dengan diploma pascasarjana
- 2) Program *Bachelor of Education* (B.Ed) untuk memenuhi syarat menjadi guru harus menempuh studi empat tahun
- 3) Sementara untuk Diploma Pacasarjana dalam pendidikan menempuh studi selama satu tahun dengan program *fulltime*.
- 4) Terbitnya ijazah merupakan sebagai tanda dan syarat untuk menjadi guru profesional di Hong Kong
- 5) Baik B.Ed maupun program diploma menwarkan pembelajaran utama yang mencakup Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Matematika, Pelajaran Umum, Pendidikan Sains, Pendidikan Teknologi, Pendidikan Sosial dan Humaniora, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani, dan Studi Liberal.

Sementara Pemerintahan Hong Kong mengeluarkan ketentuan pelatihan dan kualifikasi guru yang di muat di laman resmi *Educate Bureau The Government of the Hong Kong Special Administrative Region* diantaranya:

a. Menetapkan standar profesional untuk masuk ke profesi mengajar

Setiap orang yang ingin mengajar di di sekolah harus terdaftar di bawah Undang-Undang Pendidikan sebagai guru terdaftar atau guru yang diizinkan. Adapun guru yang terdaftar adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi guru yang disetujui dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan. untuk meningkatkan profesionalisme dan status profesional guru, pemerintah telah menugaskan penelitian tentang pengembangan kompetensi guru dan kerangka kerja pengembangan profesional yang akan

memberikan dasar empiris dan berkontribusi untuk memperkaya kerangka kerja pembangunan profesional berkelanjutan bagi para guru.

- b. Menetapkan persyaratan kemampuan bahasa untuk Bahasa Inggris dan *Putonghua*.

Semua guru Bahasa Inggris dan *Putonghua* yang memegang jabatan permanen di sekolah sektor public atau sekolah dasar negeri/sekolah menengah negeri atau swasta, harus memenuhi standar *Language Proficiency Requirement* (LPR) dari bahasa yang relevan.

- c. Mewajibkan semua guru baru untuk menjadi lulusan yang terlatih

Sebuah kewajiban dari Pemerintah Hong Kong dalam jangka panjang untuk mewajibkan guru baru untuk dilatih secara profesional dan pemegang gelar. Pelatihan guru untuk pra-jabatan untuk Sekolah Dasar dan Menengah ditingkatkan secara progresif ke tingkat lebih atas. (<http://www.edb.gov.hk>)

- d. Kualifikasi Guru pada Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri (independen), tetapi menggunakan pendekatan *cross-curricular* dan tidak diajarkan oleh guru spesialis Pendidikan Kewarganegaraan. Di sekolah menengah, mata pelajaran Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan termuat di beberapa mata pelajaran seperti Pendidikan bahasa Cina, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan sains, Pendidikan teknologi, Pendidikan pribadi, sosial, dan humaniora, Pendidikan seni; dan, Pendidikan Jasmani (ICCS, 2013: 181).

Wing On dan Kennedy dalam laporan ICCS (2013: 191-192) mengatakan bahwa guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar dan menengah tidak harus memiliki pelatihan atau sertifikasi tambahan di bidang ini, tetapi setidaknya semua guru kelas umum dengan dasar pelatihan dan kualifikasi yang dimiliki diharapkan untuk mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di kelas. Ada sebuah kekhawatiran yang terjadi yakni tidak ada guru yang cukup berkualitas untuk mengajarkan mata pelajaran ini. Hal ini dapat didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fairbrother di tahun 2015 bahwa rendahnya kesadaran masyarakat muda Hong Kong pada

umumnya terkait kesadaran demokratis, cenderung apatis, lemahnya pemahaman tentang aturan hukum, kebijakan pemerintah, dan urusan politik dan identitas nasional yang sangat rendah (Fairbrother & Kerry Kennedy, 2011: 427). Oleh karena perlu sebuah reformasi kurikulum dalam untuk pengembangan kesadaran masyarakat muda di Hong Kong akan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.

SIMPULAN

Dalam konteks Pendidikan kewarganegaraan di Hon Kong, semenjak penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Inggris ke negara Cina Daratan, pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada penanaman moral dan nilai-nilai identitas nasional dengan doktrinasi dari pemerintahan Cina. Tetapi menariknya Hong Kong menganut sistem pemerintahan liberal karena secara historis Hong Kong lebih dekat dengan Inggris sehingga Hong Kong diberikan hak keistimewaan oleh pemerintahan Cina menjadi wilayah khusus administratif dibawah satu negara dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda.

Substansi profesionalisme guru di Hong Kong jika dilihat dari standar kualifikasi dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain sehingga tidak ada kualifikasi khusus yang menjadi prasyarat dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan. Di Hong Kong substansi pengajaran Kewarganegaraan di sekolah lebih menekankan pada pembentukan moral dan identitas nasional kepada siswa semenjak kedaulatan diserahkan kepada Pemerintahan Cina Daratan. Pendidikan Kewarganegaraan dilihat dari strategi mengajar guru yang digunakan di sekolah, bahwa di Hong Kong konteks Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan berorientasi pada guru dikarenakan masih kuatnya hegemoni guru di dalam kelas dimana peran guru sangat kuat sekali sehingga menciptakan keterbatasan siswa dalam mengkreasikan pemikiran mereka dalam proses pembelajaran sebagaimana hasil penelitian *Ye Wong*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainley, J dkk (eds). (2013). *ICCS Encyclopedia and Citizenship Education Around the World*. Netherlands: IEA
- Fairbrother, G.P & Kennedy, K.J. (2011). Civic Education Curriculum Reform in Hong Kong: what should be the direction under Chinese sovereignty?. Dalam jurnal *Cambridge Journal of Education*. Vol. 41, No. 4, pp 425-443.
- Heggart, K. 2018. Civics and citizenship education: What have we learned and what does it mean for the future of Australian democracy?. Dalam Jurnal *Education, Citizenship and Social Justice*. Vol. 0, No. 0, p 1-17

- Kennedy et al (eds). 2011. *Citizenship Pedagogies in Asia and Pasific*. Hongkong: Springer
- Loughran, Monash University, Clayton (eds). 2016. *Self-studies in Rural Teacher Education*. Sitzerland: Springer
- Lawrence et al (2014). *Best Practice Teacher Education Programs and Australia's Own Programs*. Australia: ACER
- Leung, Y.W & Yu Ung, H. (2014). Delivering Civic Education in Hong Kong: Why is not an in independen subject?. Dalam Jurnal *Citizenship, Social and Economics Education*. Vol. 13, No. 1, pp 1-13.
- Ministerial Council on Education, Employment, T. and Y. A. (2008). *Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians*. Australia: Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs
- Tin, J & Lo, Y. (2010). Primary Social Education Curriculum in Hong Kong and Singapore. Dalam Jurnal *Research in Comparative and International Education*. Vol. 5, No. 2, pp 144-155.
- The Curriculum Development Council. (2012). *Moral and National Curriculum Guide (Primary 1 to Secondary 6)*. Hong Kong: The Curriculum Development Hong Kong
- The Curriculum Development Council. (2012). *Moral and Civic Education: Towards Values Education*. Hong Kong: The Curriculum Development Hong Kong.
- Rusdiana & Heryati. Y. (2015). *Pendidikan Profesi Keguruan*. Bndung: CV Pustaka Setia.
- Yee Wong, M (2015). *Teacher-Student Power Relation in Primary Schools in Hong Kong*. London: Lexington Books.
- <http://www.edb.gov.hk/en/teacher/qualification-training-development/qualification/teacher-training-qualifications/index.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2018.